BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Di Indonesia penelitian tentang model *Intellectual Capital, Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh positif antara *intellectual capital*, pengungkapan CSR dengan kinerja keuangan antara lain Adhita Setya Nurhudha (2015), Wahyuni Agustina, Gede Adi Yuniarta, Ni Kadek Sinarwati (2015), Tri Puji Lestari, Azib, dan Nurdin (2015), Cecilya Gunawan (2013), Sigit Hermawan dan Maharis Budi Wahyudi (2013), Enni Savitri dan Agnessia A. Kinanti (2013), dan Rizky Arifani (2013).

1. Adhita Setya Nurhudha (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis pengaruh Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital, dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Hasil dari penelitiannya yaitu Corporate Social Responsibility berpengrauh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, Intellectual Capital tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Persamaan

Persamaannya Penelitian yang dilakukan oleh Adhita Setya Nurhudha dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Menggunakan ROE sebagai alat ukur untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan aktiva atau modal yang dimiliki.

Perbedaan

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini tidak menggunakan kinerja lingkungan sebagai variabel independen sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen.

2. Wahyuni Agustina, Gede Adi Yuniarta, Ni Kadek Sinarwati (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh *Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan, studi kasus pada perusahaan BUMN yang terdaftar di di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa hasil uji model regresi terhadap 45 perusahaan sampel dari tahun 2011-2013, yaitu *Intellectual Capital* berpengaruh signifikan terhadap nilai ROA, CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai ROA, GCG berpengaruh signifikan terhadap ROA, uji simultan menunjukkan bahwa *Intellectual Capital*, CSR dan GCG berpengaruh signifikan terhadap nilai ROA.

Persamaan

Persamaannya Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Agustina, Gede Adi Yuniarta, dan Ni Kadek Sinarwati dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Menggunakan ROA sebagai alat ukur dan menghitung tentang kinerja keuangan.

Perbedaan

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini tidak menggunakan *Good Corporate Governance* sebagai variabel independen, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan *Good Corporate Governance* sebagai variabel independen. Penelitian terdahulu menggunakan sampel pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Puji Lestari, Azib, dan Nurdin (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), dan Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan dengan metode Tobin's Q pada perusahaan Sri-Kehati yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan serdapat pengaruh yang signifikan antara Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, dan Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan variabel Intellectual Capital terhadap nilai perusahaan tidak terdapat pengaruh.

Persamaan

Persamaannya Penelitian yang dilakukan oleh Tri Puji Lestari, Azib, dan Nurdin dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan *Intellectual Capital* dan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen. Menggunakan metode penilaian dan pengukuran *Intellectual Capital* yang dikembangkan oleh Pulic (1998) yaitu metode *Value Added Intellectual Capital* (VAICTM).

Perbedaan

Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan sector food and beverages tahun 2012-2014. Menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen.

4. Penelitian Yang dilakukan oleh Sigit Hermawan dan Maharis Budi Wahyuaji (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh *Intellectual Capital* terhadap kemampulabaan perusahaan manufaktur *consumer goods* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2009. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa IC yang diukur dengan (VAICTM) tidak ada pengaruh signifikan terhadap GPM dan NPM tetapi terdapat pengaruh negatif terhadap variabel ROA dan ROE. Tidak adanya pengaruh pengaruh ini dapat disebabkan karena faktor utama penentu besarnya *gross profit margin* adalah bukan dari tenaga kerja. Adanya kenaikan beban karyawan tanpa adanya peningkatan produktivitas kerja membuat IC berpengaruh negatif terhadap ROE dan ROA, karena beban karyawan yang bertambah tetapi *net profit*nya tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Persamaan

Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Hermawan dan Maharis Budi Wahyuaji (2013) yaitu, persamaanya dengan penelitian sekarang yaitu sama menggunakan *Intellectual capital* sebagai variabel independen. Menggunakan metode pengukuran *Intellectual Capital* yang dikembangkan oleh Pulic (1998) yaitu metode *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM).

Perbedaan

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini menggunakan kemampulabaan perusahaan dalam variabel dependen yang diproksikan dengan gross profit margin, net profit margin, ROA dan ROE. Kemudian peneliti terdahulu menggunakan sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur consumer good di BEI.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Cecilya Gunawan (2013)

Melakukan penelitian terhadap badan usaha manufaktur yang *go public* di BEI selama tiga tahun berturut-turut yaitu sejak 2009 sampai dengan 2011. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari *intellectual capital* (VAICTM) terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE, ATO, dan M/B). Namun apabila ditinjau secara mendalam dari masing-masing komponen *intellectual capital* (VAICTM), *capital employes* (CEE) yang memiliki pengaruh paling besar.

Persamaan

Penelitian yang dilakukan oleh Cecilya Gunawan dengan persamaan penelitian sekarang yaitu, sama menggunakan variabel independen Intellectual Capital (IC).

Perbedaan

Perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian menggunakan profitabilitas dan *traditional measures of corporate performance* sebagai variabel dependen. Kemudian pada peneliti terdahulu menggunakan sampel pada badan

usaha manufaktur yang *go public* di BEI periode 2009-2011, sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan perusahaan *food and beverages*.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Enni Savitri dan Agnessia A. Kinanti (2013)

Melakukan penelitian terhadap pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Finansial yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap ROE, dan pengaruh yang signifikan antara CSR dan *Return* Saham

Persamaan

Penelitian yang dilakukan oleh Enni Savitri dan Agnessia A. Kinanti dengan persamaan penelitian yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independennya CSR dan variabel dependennya menggunakan kinerja keuangan

Perbedaan

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pertambangan, sedangkan untuk penelitian sekrang menggunakan perusahaan *food and beverages*. Periode penelitian terdahulu diambil pada tahun 2009-2011, sedangkan penelitian sekarang mengambil data periode penelitian tahun 2012-2014

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Arifani (2013)

Melakukan penelitian mengenai pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengamil sampel dari perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI. Dari penelitian ini diperoleh hasil komite audit mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan dibentuknya komite audit mampu untuk mengawasi manajemen dalam

meningkatkan kinerja keuangannya. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan, hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh institusi di luar perusahaan mampu menjadi *controller* dalam pengambilan keputusan oleh manajemen sehingga tercipta kinerja keuangan yang baik, dan komisaris independen yang terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Persamaan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky Arifani yaitu, persamannya dengan penelitian sekarang yaitu sama menggunakan *Good Corporate Governance* sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Menggunakan ROA sebagai alat pengukuran pada kinerja keuangan perusahaan dan Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris sebagai komponen dari penelitian *Good Corporate Governance*.

<u>Perbedaan</u>

Perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian ini menggunakan *Intellectual Capital* dan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel dependen dan sampel dalam penelitian ini dari perusahaan sektor *food and beverages* dari periode 2012-2014.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang timbul akibat adanya hubungan antara pemilik (*stakeholder*) dengan pengelola (manajer) suatu organisasi, dimana manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manejemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Sebelum tahun 1976, teori keuangan memakai model ekonomi standar untuk menggambarkan perilaku perusahaan. Dalam hubungan *agent-principal*. Pihak *agent* memanfaatkan kesempatan pada hubungan pemegang saham (*principal*) dengan pemberi pinjaman (*pricipal*) pihak pemegang saham yang mengambil kesempatan dalam hubungan tersebut.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara agen dan principal sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu perusahaan karena memiliki peranan khusus yang di dalamnya di mana para pemangku kepentingan memiliki kekuasaan yang riil yang dapat medukung atau menghalangi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selain itu, di dalam mengejar tujuan yang akan dicapai

perusahaan, perusahan dapat membuat keputusan yang memiliki dampak bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).

Biaya agensi yang timbul dari konflik kepentingan antara pengelola perusahaan (agent) dengan pemegang saham (principal) berpotensi menimbulkan jenis biaya agensi berikut ini.

- a. Biaya akibat ketidakstabilan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak agent.
- Biaya yang timbul akibat pilihan proyek yang tidak sama dengan jika pilihan tersebut dilakukan oleh pemegang saham karena risiko meruginya tinggi.
- c. Biaya yang timbul karena dilakukannya kegiatan *monitoring* kinerja dan perilaku *agent* oleh *principal* (*monitoring cost*).
- d. Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan-pembatasan bagi kegiatan *agent* oleh *principal* (*bonding cost*). (Adrian, 2012 : 16-17).

Paper mengenai teori keagenan pada manajemen keuangan, menunjukkan hubungan keagenan atau *agency relationship*, muncul ketika suatu atau lebih individu (majikan) menguji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen keuangan hubungan ini muncul antara: (1) pemegang saham *(stakeholders)* dengan para manajer dan (2) *shareholders* dengan kreditor *(bondholders)* atau pemegang obligasi). Masalah keagenan antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. (David dan Christian, 2009: 13-14).

2.2.2 Stakeholder Theory

Stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, the success or failure of an organitation (Luk, et al 2005). Dengan demikian stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti : pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemberhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan economic measurement yang cenderung shareholder orientation, ke arah memperhitungkan faktor sosial (social factors) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (stakeholder orientation) (Hadi, 2011: 93-95)

2.2.3 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O'Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Legitimasi merupakan

manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern).

Gray et. al, (1996) berpendapat bahwa legitimasi merupakan "...a systems-oriented view of organisation and society...permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationshipbetween organisations, the state, individuals and grup".

Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat (Hadi, 2011: 88)

2.2.4 Intellectual Capital

Menurut Brooking (1996) dalam Ulum, (2008) menyatakan bahwa IC adalah istilah yang diberikan kepada aset tidak berwujud yang merupakan gabungan dari pasar dan kekayaan intelektual, yang berpusat pada musim dan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan untuk berfungsi. Roos *et al.* (2007) dalam Ulum, (2008) menyatakan bahwa *Intellectual Capital* termasuk semua proses dan aset yang tidak biasanya ditampilkan pada neraca dan seluruh aset tidak berwujud (merek dagang, paten dan brands) yang dianggap sebagai metode akuntansi modern.

Stewart (2002) menyatakan bahwa *Intellectual Capital* adalah jumlah semua hal yang diketahui dan diberikan oleh semua orang dalam suatu badan usaha, yang dapat memberikan keunggulan bersaing dalam bentuk materi intelektual, pengetahuan, informasi, hak kepemilikan intelektual, serta pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan bagi badan usaha tersebut. Sifat dari

Intellectual Capital tidak sama dengan aset yang dikenal pada umumnya karena sifat dari Intellectual Capital adalah tidak berwujud.

Di Indonesia definisi dan pengakuan secara pelaporan mengenai aset tak berwujud telah dimuat dalam PSAK No. 19. Persamaan antara aset tak berwujud dengan *Intellectual Capital* terutama dalam item-item *structural capital*, sedangkan item *human capital* dan *relational capital* terkadang sama. Sampai saat ini Indonesia belum ada pengaturan yang jelas mengenai aset tak berwujud.

Sedangkan menurut International Federation of Accountants (IFAC), Intellectual Capital, intellectual asset (aset intelektual), dan knowledge asset (aset pengetahuan). modal ini dapat diartikan sebgai saham atau modal yang berbasis pada pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Hal ini juga merupakan hasil akhir dari proses transformasi pengetahuan atau pengetahuan itu sendiri yang dijadikan dalam bentuk aset atau hak intelektual perusahaan. Lebih lanjut IFAC juga mengestimasikan bahwa pada saat ini 50-90 persen nilai perusahaan ditentukan oleh manajemen atas Intellectual Capital bukan manajemen terhadap aktiva tetap.

Menurut Stewart (1997), banyak praktisi yang menyatakan bahwa IC terdiri dari tiga elem utama, yaitu :

1. Human Capital

Human capital merupakan hal utama dalam modal intelektual. Di sinilah sumber inovasi dan pengembangan, tetapi merupakan komponen yang sulit diukur. Karakteristik dasar yang dapat diukur dari modal ini, yaitu program pelatihan, kepercayaan, pengalaman, pembelajaran, potensi individu, dan personalitas.

2. Structural Capital atau Organizational Capital

Structural Capital merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Misalnya sistem operasional perusahaan, proses manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual property yang dimiliki perusahaan.

3. Relational Capital merupakan komponen Intellectual Capital yang memberikan nilai secara nyata. Relational Capital merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar.

2.2.5 Good Corporate Governance

Konsep Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan shareholders dan stakeholders. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan

perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Tata Kelola Perusahaan adalah suatu subyek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusaha-an harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham.

Menurut Sutedi (2012) " Good Corporate Governance yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika". Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Dalam konsep penerapan GCG terdapat empat

komponen utama yang diperlukan yaitu, *fairness*, *transparancy*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut sangat terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG-UGM) dalam (Warsono,dkk.,2009) adalah sebagai berikut:

a. Transparency (Transparansi)

Dalam menjalankan fungsinya, semua partisipan harus menyampaikan informasi yang material sesuai dengan substansi yang sesungguhnya dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami secara mudah oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

b. Accountability (Pertanggungjawaban)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan CG harus mempertanggungjawabkan amanah yang diterima sesuai dengan hukum, peraturan, standar moral dan etika, maupun *best practise* yang berterima umum.

c. Responsiveness (Ketanggapan)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan CG harus tanggap dan antisipatif terhadap permintaan (*request*) maupun umpan-balik (*feedback*) dari pihak-pihak yang berkepentingan dan terhadap perubahan-perubahan dunia usaha yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.

d. *Independency* (Independensi)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan harus bebas dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan, dan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang memadai. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Gover-nance* juga mempunyai prasyarat tersendiri. Menurut Daniri (2005) ada dua faktor yang memegang peranan, faktor ekternal dan internal. Faktor Eksternal yaitu beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya: a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. b) dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga pemerintahaan yang diharapkan dapat mengatur jalannya pemerintahan agar lebih baik.

e. Fairnes (Keadilan)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan memperlakukan pihak lain berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berterima umum.

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* juga mempunyai prasyarat tersendiri. Menurut Daniri (2005) ada dua faktor yang memegang peranan, faktor ekternal dan internal. Faktor eksternal yaitu beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG di antaranya:

- a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b) Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.

c) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional.

Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).

Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a) Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- Manajemen pengendalian risiko perusahaam juga didasarkan pada kaidahkaidah standar GCG.
- d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.2.6 Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Kompleksitas permasalahan sosial (social problems) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Hendrik, 2008:1).

Corporate Social Resposibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggungjawab sosial di bidang hukum (Darwin 2004). Pendapat Friedman dalam Suharto (2008) menyatakan bahwa tujuan utama korporasi adalah memperoleh profit semata semakin ditinggalkan. Sebaliknya konsep triple bottom line (profit, planet, people) yang digagas oleh John Elkington makin masuk ke dalam mainstream etika bisnis (Suharto, 2008).

Perkembangan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang dikemukakan oleh John Eklington (1997) tyang terkenal dengan "The Triple Botton Line" yang dimuat dalam buku "Canibalts with Forks, the Triple Botton Line of Twentieth Century Business". Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya profit yang diburu, namun harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Konsep Triple Botton Line tersebut merupakan kelanjutan dari konsep sustainable development yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab, baik kepada shareholder maupun stakeholder.

Keterbatasan peranan negara menyelesaikan permasalahan sosial tersebut, desentralisasi sebagai wujud pengakuan pada peranan sektor privat telah memberi peluang yang cukup besar bagi sektor tersebut untuk menyumbangkan *resources* yang dimilikinya guna menyelesaikan masalah sosial tersebut. Dengan demikian, era desentralisasi merupakan momentum yang relevan bagi realisasi program CSR sebagai wujud keterlibatan sektor privat dalam memberdayakan masyarakat miskin sehingga mereka terbebas dari permasalahan sosial yang mereka hadapi.

Tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan interrelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat, khususnya akibat perkembangan ilmu sehingga meningkatkan kesadaran dan perhatian lingkungan memunculkan tuntutan tanggung jawab perusahaan. Hal itu karena, peningkatan pengetahuan masyarakat meningkatkan keterbukaan ekspektasi masa depan dan sustainabilitas pembangunan.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak tahun 1979 yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai pemenuhan hukum, penghargaan masyarakat terhadap lingkungan serta komitmen dunia usaha. CSR bukan hanya kegiatan *karikatif* perusahaan dan kegiatannya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hukum dan aturan yang berlaku. Lebih dari itu CSR diharapkan memberikan manfaat dan nilai guna bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Tanggung jawab sosial (social responsibility) mengandung interprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder). Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsp tanggung jawab sosial (social responsibility) menjadi tiga, yaitu : (1) sustainability; (2) accountability; dan (3) transparency.

Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal (Crowther David, 2008). Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan.

Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi,

kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Post (2002) menyatakan bahwa ragam tanggung jawab perusahaan terdiri dari tiga dimensi, yaitu :

Economis Responsibility, keberadaan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi shareholder, seperti: meningkatkan keuntungan (laba), harga saham, pembayaran dividen, dan jenis lainnya. Di samping itu, perusahan juga perlu meningkatkan nilai bagi para kreditur, yaitu kepastian perusahaan dapat mengembalikan pinjaman berikut *interest* yang dikenakan.

Legal Resposnsibility, sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk, ketika perusahaan sedang menjalankan aktivitas operasi, maka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundangan.

Social Responsibility, merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan. Social responsibility menjadi satu tuntutan ketika operasional perusahaan mempengaruhi pihak eksternal, terutama ketika terjadi externalities dis-economic (Hadi, 2011)

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memberikan berbagai manfaat potensial bagi perusahaan. Dalam ISO 26000 disebutkan manfaat CSR bagi perusahaan yaitu :

1. Mendorong lebih banyak informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat, peluang jika kita melakukan tanggung jawab sosial (termasuk manajemen

- risiko hukum yang lebih baik) dan risiko jika tidak bertanggung jawab secara sosial.
- 2. Meningkatkan praktek pengelolaan risiko dari organisasi.
- 3. Meningkatkan reputasi organisasi dan menumbuhkan kepercayaan publik yang lebih besar.
- 4. Meningkatkan daya saing organisasi.
- 5. Meningkatkan hubungan organisasi dengan para stakeholder dan kapasitasnya untuk inovasi, melalui paparan perspektif baru dan kontak dengan para stakeholder.
- 6. Meningkatkan loyalitas dan semangat kerja karyawan, meningkatkan keselamatan dan kesehatan baik karyawan laki-laki maupun perempuan dan berdampak positif pada kemampuan organisasi untuk merekrut, memotivasi dan mempertahankan karyawan.
- 7. Memperoleh penghematan terkait dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya, konsumsi air dan energi yang lebih rendah, mengurangi limbah, dan meningkatkan ketersediaan bahan baku.
- 8. Meningkatkan keandalan dan keadilan transaksi melalui keterlibatan politik yang bertanggungjawab, persaingan yang adil, dan tidak adanya korupsi.
- Mencegah atau mengurangi potensi konflik dengan konsumen tentang produk atau jasa.
- 10. Memberikan kontribusi terhadap kelangsungan jangka panjang organisasi dengan mempromosikan keberlanjutan sumber daya alam dan jasa lingkungan.

 Kontribusi kepada masyarakat dan untuk memperkuat masyarakat umum dan lembaga.

2.2.7 Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu untuk pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektivitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi diartikan sebagai *ratio* (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal. Ada kalanya kinerja keuangan mengalami penuruan. Untuk memperbaiki hal tersebut, salah satu caranya adalah mengukur kinerja keuangan dengan menganalisa laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan.

Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola perusahaan untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya dan dijadikan landasan pemberian *reward and punishment* terhadap manajer dan anggota organisasi. Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai perusahaan dan menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen serta mampu menciptakan nilai perusahaan

itu sendiri kepada para *stakeholder*. Menurut Mulyadi (1997, hal 419) dalam Sucipto (2003) penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standaran kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

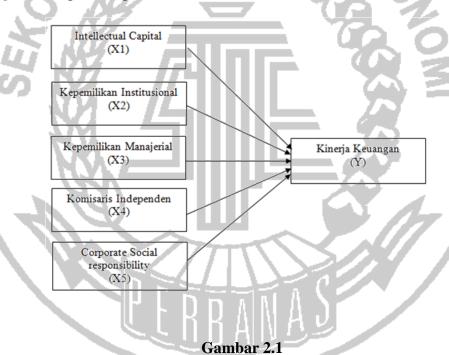
Kinerja keuangan perusahaan ditunjukkan oleh laporan keuangan perusahaan. Return On Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menghubungkan antara laba yang diperoleh dari kegiatan pokok atau aktifitas perusahaan dengan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan serta keuntungan bagi perusahaan. ROA (return on asset) merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (Rachmawati, 2012)

2.3 Kerangka Pemikiran

Laporan tahunan adalah media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder dan pengguna lainnya. Karena mempunyai kandungan informasi tentang gambaran umum perusahaan kepada stakeholder. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan tentang IC pada laporan tahunan perusahaan dapat membantu perusahaan untuk menjelaskan apa yang dimiliki oleh perusahaan dan belum disampaikan, maka dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan perusahaan dalam keberhasilan pertumbuhan dan pencapaian nilai perusahaan dapat tercapai.

Pengungkapan GCG pada laporan tahunan perusahaan dapat membantu perusahaan untuk menghambat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), untuk meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Mekanisme lainnya adalah untuk menekankan pada pentingnya hak pemegang saham agar memperoleh informasi yang andal, akurat, dan tepat waktu.

Pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan dapat membantu perusahaan dalam menjelaskan aktivitas sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat. Sehingga tujuan perusahaan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainability development) dapat tercapai.



Kerangka Pemikiran

2.4 <u>Hipotesis Penelitian</u>

2.4.1 Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Kinerja keuangan merupakan gambaran atas kondisi keuangan sebuah perusahaan (Sawir, 2005 dalam Solikhah 2010). Intellectual capital merupakan sumber daya yang terukur untuk peningkatan competitive advantages sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Intellectual capital diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Sebagian besar dari hasil penelitian, seperti misalnya penelitian Tan et al. (2007) dan Chen et al. (2005) menunjukkan bahwa modal intelektual (IC) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola pengetahuan dan sumber daya intelektualnya diyakini mampu menciptakan value added serta mampu menciptakan competitive advantage dengan melakukan inovasi, penelitian dan pengembangan yang akan bermuara terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Dari sudut pandang teori Stakeholder dinyatakan bahwa manajer korporasi akan berusaha memperoleh value added (nilai tambah) yang selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada seluruh stakeholder. Oleh karena itu, para stakeholder akan berperan sebagai kontrol dalam rangka penggunaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan termasuk sumber daya intelektual. Peningkatan kinerja keuangan akan berdampak positif pada return yang didapat oleh stakeholder. Oleh karena itu, para *stakeholder* akan berperan sebagai pengendali dalam pengelolaan sumber daya perusahaan termasuk sumber daya intelektual.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini ditulis dalam bentuk alternatif, yaitu:

H1: Intellectual Capital mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Jensen dan Meckling (1976) dalam Andreawan (2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka akan memperkuat motivasi manajemen dalam bekerja sehingga akan meningkatkan nilai saham perusahaan di masa mendatang. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, maka akan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Dari hasil penelitian Arifani (2013) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini ditulis bentuk alternatif, yaitu:

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen, yang dapat diukur dari presentase saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kepemilikan saham perusahaan oleh manajer cenderung melakukan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan jangka panjangnya. Insentif berupa saham yang diberikan kepada pihak manajer memacu mereka untuk bekerja lebih keras dan cerdas dalam meningkatkan nilai badan usaha, yang juga merupakan milik pihak manajer. Puspitasari dan Ernawati (2010) menyatakan bahwa komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategis. Dari hasil penelitian Arifani (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan pemberian kontribusi terhadap nilai perusahaan melalui aktivitas evaluasi diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini ditulis dalam bentuk alternatif, yaitu:

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.4.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan

Dewan Komisaris Independen merupakan suatu badan usaha pada perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan menyeluruh. Penelitian dari Wardhani (2007) dalam Kurnianto (2011) menyatakan bahwa *corporate social reporting* berpengaruh positif terhadap ROA perusahaan. Namun pada penelitian Andreawan (2013) memberikan bukti bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Semakin besar jumlah komisaris independen maka keputusan yang dibuat dewan komisaris lebih mengutamakan kepada kepentingan perusahaan, sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Santoso, 2012). Dengan demikian diharapkan kinerja perusahaan akan semakin meningkat di masa depan dengan adanya dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini ditulis dalam bentuk alternatif, yaitu:

H4: Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.4.5 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan

CSR dilakukan karena keberadaan perusahaan di tengah lingkungan yang dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak terhadap lingkungan eksternalnya. Eksistensi perusahaan dapat mengubah masyarakat, baik ke arah positif maupun negatif. CSR adalah klaim agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholder*), tapi juga terhadap pihak *stakeholders*. Elkington (2004) mengatakan bahwa tujuan bisnis saat ini tidak

hanya mengacu pada laba perusahaan (*profit*), tetapi juga kesejahteraan masyarakat (*people*) serta kelestarian lingkungan (*planet*). Pengungkapan CSR dalam teori legitimasi dapat dijadikan sebagai suatu alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). Penelitian Heal dan Garret (2004) dalam Dahlia dan Siregar (2008) menunjukkan bahwa aktivitas CSR dapat menjadi elemen yang menguntungkan sebagai strategi perusahaan, memberikan kontribusi kepada manajemen risiko dan memelihara hubungan yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini ditulis dalam bentuk alternatif, yaitu:

H5: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

